

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING
FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

(PERIODE 2013-2017)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Dika Meidawati

NPM: 1451020186

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2018 M / 1439 H**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING
FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE 2013 – 2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Dika Meidawati
NPM 1451020186**

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H.

Pembimbing II : Ghina Ulfah Saefurrahman, Lc., M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2018 / 1439 H**

ABSTRAK

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Contohnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana mereka sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya dengan masa pengendapan yang memadai. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Disamping itu pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?, apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?, apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?, dan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Net Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian ini jenis penelitian kuantitatif yang bersifat *asosiatif*, dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang ada di Indonesia (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah periode 2013-2017 dan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data penelitian ini dalam rentan waktu 60 bulan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis yang dilakukan adalah uji t, dan koefisiensi *determinasi Rsquare* R^2 dengan taraf signifikansi sebesar 5% pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Eviews 9.

Hasil analisis regresi linier berganda $Y = -0.348897$ (DPK) -0.126402 (NPF). Dari hasil analisis secara simultan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) diketahui jumlah dana pihak ketiga dan non performing financing mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Kedua variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan sebesar 91,98% dan sisanya 8,02% dipengaruhi variabel lainnya. Secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga H_1 dan H_2 masing-masing diterima.

Kata kunci : DPK, NPF, Alokasi Pembiayaan UMKM.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl Let.kol H. EndroSuratmin Sukarame Telp: (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2013-2017**

Nama : Dika Meidawati

NPM : 1451020186

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asriani, S.H., M.H
NIP. 196503121994031002

Ghina Ulfah Saefurrahman, Lc., M.E.Sy
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl Let.kol H. Endro Suratmin Sukaramo Telp: (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017** disusun oleh: **Dika Meidawati NPM: 1451020186** Jurusan: **Perbankan Syari'ah** telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 September 2018.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Ahmad Habibi, S.E., M.E

(.....)

Sekretaris : Okta Suprianingsih, M.E.Sy

(.....)

Penguji I : Evi Ekawati, M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Asriani, S.H., M.H

(.....)

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



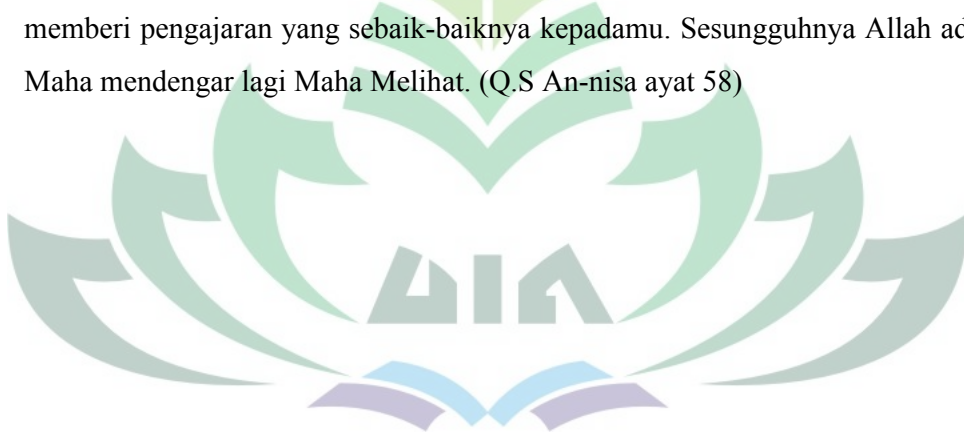
Dr. Moh. Baharuddin, M.Ag
NIP: 195808241989031003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa ayat 58)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang telah diberikan Allah SWT, dan rasa bangga yang amat dalam penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tersayang dan terkasih, teruntuk :

1. Ayahanda tercinta Tedi Trisnayadi dan Ibunda tersayang Samawati, yang tiada henti-hentinya selalu berdo'a, berjuang untuk keberhasilanku memberi cinta dan kasih sayang serta mendidikku.
2. Kakakku tersayang Opi Trisnawati dan adikku tersayang Arif Rahman Cahyadi, terimakasih atas kasih sayang dalam memberi semangat.
3. Keluarga besarku yang aku sayangi, bibi Lis, bibi Oom, bibi Mila. Sepupuku Fitri Liani, Ghea Luna, Putri Amelia, Banu, Nida, Davin, Azka Riri, Bentar. Yang telah mendoakan, membantu baik moril ataupun materil serta menghibur.
4. Keluarga kedua ku dikampus, sahabat-sahabat seperjuanganku tercinta, my support system "Mantap Qolbu" yang tiada henti selalu mendukung dan berada dalam keadaan apapun. Berbagi keluh kesah kehidupan dikampus terimakasih kepada Endang Sapitri, Farida Aryani, Fernita Safitri, Indri Ambarukmi, Luvita Ningsih, Maya Astriana, Ratna Juwita S, Sarah Edma P, Siti Rexa Riayanda terimakasih atas segalanya, terimakasih selalu berada disisi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung, yang aku banggakan tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Dika Meidawati lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 02 Mei 1996, anak kedua dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Tedi Trisnayadi dan Ibu Samawati. Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Taman Siswa Teluk Betung lulus pada tahun 2008
2. SMP Negeri 6 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011
3. SMA Negeri 8 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN pada tahun 2014.



Bandar Lampung, 3 Juli 2018

Dika Meidawati
NPM 1451020186

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, dan Shalawat serta salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2013-2017)”**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan bimbingan, dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Asriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Ghina Ulfah Saefurrahman, Lc., M.E.Sy. dengan penuh kesabaran dalam memberi arahan serta kemudahan dalam membimbing dan selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Muhammad Iqbal, M.E.I, selaku dosen statistik 2 yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam mengolah data sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
6. Apak dan mamah tersayang, beserta keluarga, terimakasih atas segala do'a, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat ku tersayang yang hingga sekarang masih menemani "The Cengos" Amelia Rizkyanti, Ayu Ardiyanti, Grechita Alie, Nurulita, Ratna Mustika terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis terimakasih atas do'a serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat ku terkasih, Mpok Dea, Tri Ayu, kak Ayu Dwi, uni Cindo, uni Zefa terimakasih atas dukungan, motivasi, terlebih do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas B angkatan 2014 Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Keluarga besar UKM-F RISEF yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berorganisasi, menimba ilmu serta mendapatkan pengalaman yang luar biasa.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak sedikit dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala bantuannya baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 3 Juli 2018

Dika Meidawati
NPM.1451020186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
A. Bank Syariah	14
1. Pengertian Bank Syariah.....	14
2. Fungsi Bank Syariah.....	18
3. Peran Bank Syariah.....	19
4. Tujuan Bank Syariah	20
5. Rancang Bangun Ekonomi Islam	22
B. Pembiayaan	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Tujuan Pembiayaan.....	24
3. Fungsi Pembiayaan	26
4. Unsur – unsur Pembiayaan.....	28
5. Jenis – jenis Pembiayaan.....	30
C. Sumber Dana Bank	35
1. Pengertian Sumber Dana	35
2. Sumber – sumber Dana Bank	37
D. Non Performing Financing	45
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	46
1. Pengertian UMKM	46
2. Kriteria UMKM	47
3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah	58
4. Masalah – masalah Utama UMKM	50

F. Kerangka Berfikir	51
G. Tinjauan Pustaka	52
H. Hubungan Antara Variabel dan Pengembangan Hipotesis.	56

BAB III METODE PENELITIAN..... 62

1. Jenis Penelitian	62
2. Sifat Penelitian	62
3. Populasi dan Sampel Penelitian	62
a. Populasi	62
b. Sampel	63
4. Data dan Sumber Data	63
a. Jenis Data	64
5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	64
a. Variabel Penelitian.....	64
b. Definisi Operasional variabel.....	65
6. Metode Pengumpulan Data	66
7. Metode Analisis Data	67
a. Uji Asumsi Klasik.....	68
b. Uji Hipotesis.....	72
c. Uji Koefisiensi Determinan.....	73

BAB IV ANALISIS DATA..... 75

A. Deskriptif Objek Penelitian	75
1. Profil Objek Penelitian.....	75
B. Analisis Data.....	77
1. Statistik Deskriptif	77
2. Uji Asumsi Klasik	79
a. Uji Normalitas	79
b. Uji Multikolinearitas.....	80
c. Uji Autokorelasi	81
d. Uji Heteroskedasitas	81
C. Hasil Penelitian	82
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	82
2. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	83
3. Uji Hipotesis secara simultan (Uji F)	84
4. Uji hipotesis secara parsial (Uji t)	84
D. Pembahasan.....	86
1. Pengaruh DPK terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia.....	86
2. Pengaruh NPF terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia.....	90

3. Pengaruh DPK dan NPF secara simultan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 96

- A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Periode 2013-2017 (dalam Milyar Rupiah)	5
Tabel 1.2 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2013-2017	7
Tabel 1.3 Jumlah Non Performing Financing (NPF) periode 2013-2017	8
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.	78
Tabel 4.2 Uji Normalitas.	79
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.	81
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	81
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Grafik 6
2. Kerangka berfikir51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Exel Pengolahan Eviews 9
2. Uji Autokorelasi
3. Uji Heteroskedasitas
4. Uji Multikolinieritas
5. Uji Normalitas
6. Uji Regresi Linier Berganda
7. Surat Pernyataan
8. Surat Konsultasi
9. Surat Keputusan (SK)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia (periode 2013-2017) ”** sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah dalam variabel skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Penegasan judul ini dibuat untuk membatasi arti kalimat dalam penulisan dengan harapan dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

1. Pembiayaan adalah menurut undang – undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011), h. 106.

2. Dana Pihak Ketiga adalah simpanan nasabah berupa tabungan, giro serta deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun oleh bank syariah pada saat tertentu dan dinyatakan dalam milyaran rupiah.²
3. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.³
4. Alokasi Pembiayaan adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.⁴
5. Usaha Mikro dan Kecil Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁵

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif
 - a. Secara objektif pemilihan objek penelitian Dana Pihak Ketiga karena DPK merupakan sumber dana yang paling berpengaruh diantara faktor-faktor internal yang lain. Maka dari itu peneliti

² Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 91.

³ Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 84.

⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.

ingin melihat seberapa pengaruh DPK terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.

- b. Secara objektif pemilihan objek penelitian Non Performing Financing (NPF) karena npf merupakan salah satu penyebab penyaluran pembiayaan tidak maksimal

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti sebelumnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang penulis yaitu berhubungan dengan perbankan syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Negara. Di Negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁶ Contohnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana mereka sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.⁷

Pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 1.

mana salah satu dengan lainnya saling berkaitan dengan kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya.⁸

Tabel 1.1

Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Periode 2013-2017 (dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	92.672	108.138	58.142	49.119	53.509
Februari	96.493	107.080	57.780	48.718	53.416
Maret	100.793	108.327	57.203	49.410	54.555
April	102.206	109.506	54.812	49.508	55.497
Mei	103.489	63.747	51.602	49.883	55.642
Juni	103.816	63.835	52.792	51.952	57.319
Juli	108.932	62.747	50.073	51.325	55.401
Agustus	104.727	65.862	41.738	50.862	57.049
September	106.577	53.606	46.425	52.932	57.592
Oktober	107.500	64.980	46.057	53.051	57.649
November	108.311	59.148	46.798	53.795	56.991
Desember	110.086	59.806	50.291	54.530	58.979

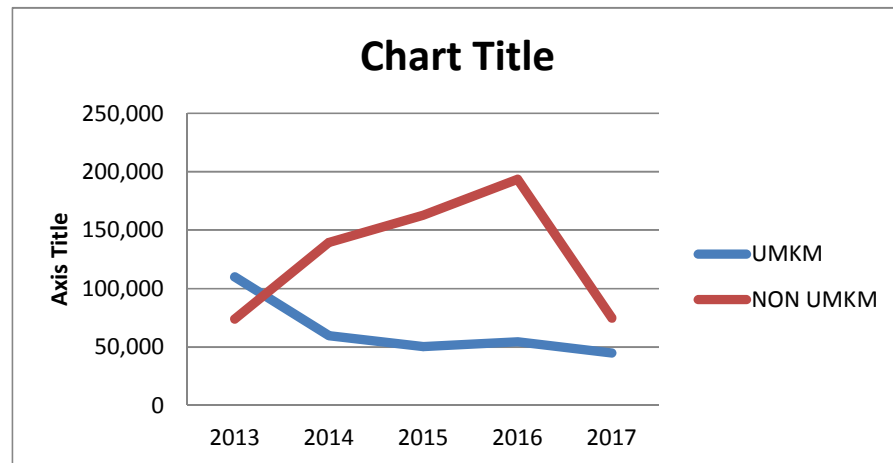
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (data diolah)

Tabel diatas merupakan perkembangan pembiayaan UMKM dan non UMKM. Dapat kita lihat pada tahun 2013 berjumlah 110.086 dan 2014 jumlah pembiayaan UMKM sebesar 59.806 milyar rupiah sedangkan pada

tahun 2015 menurun menjadi 50.291 milyar rupiah dan pada tahun 2016 naik menjadi 54.530 milyar rupiah dan pada tahun 2017 menurun

⁸Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *jurnal ekonomi dan keuangan*, Vol. 1 No. 3 (Februari 2013), h. 105-106.

menjadi 44.977 milyar rupiah. Adapun grafik yang menunjukkan bahwasannya pembiayaan UMKM cenderung menurun daripada pembiayaan non UMKM.



Gambar 1.1

Seperti yang kita lihat bahwasannya jumlah pembiayaan UMKM tidak berkembang secara baik cenderung menurun. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi usahanya. Hambatan-hambatan tersebut berbeda-beda, namun demikian ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, rintangan tersebut ialah keterbatasan modal kerja maupun investasi.

Hal ini merupakan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Namun bank tidak hanya memiliki modal sendiri, namun bank juga membutuhkan dana dari pihak luar atau dana pihak ketiga.

Tabel 1.2

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk milyar periode 2013 -
2017

Bulan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	183.534	177.930	210.761	229.094	277.714
Februari	150.795	178.154	210.297	231.820	281.084
Maret	156.964	180.945	212.988	232.657	286.178
April	158.519	185.508	213.973	233.808	291.889
Mei	163.858	190.783	215.339	238.366	295.606
Juni	163.966	191.594	213.477	241.336	302.013
Juli	166.453	194.299	216.083	243.184	307.638
Agustus	170.222	195.959	216.356	244.843	309.006
September	171.701	197.141	219.580	263.522	318.574
Oktober	174.018	207.121	219.478	264.678	319.124
November	176.292	209.644	220.635	270.480	322.715
Desember	183.534	217.858	231.175	279.335	334.719

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (data diolah)

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah dana pihak ketiga tahun 2013 berjumlah 183.534 milyar rupiah dan tahun 2014 berjumlah 217.858 milyar rupiah naik pada tahun 2015 menjadi 231.175 milyar rupiah. Pada tahun 2016 naik lagi menjadi 279.335 milyar rupiah dan pada tahun 2017 naik menjadi 334.719 milyar rupiah.

Tabel 1.3

Jumlah Non Performing Financing (NPF) dalam bentuk milyar periode 2013 - 2017

Bulan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	2,622151243	2,98137565	7,239173059	7,663022456	6,081219982
Februari	2,861347455	3,822375794	7,673935618	7,908781149	6,187284709
Maret	2,879168196	3,185724704	7,214656574	7,559198543	5,861974155
April	3,012543295	3,469216299	7,304969715	7,925991759	5,798511631
Mei	3,07665549	6,649724693	8,042323941	9,211555039	4,561302613
Juni	2,765469677	6,432208036	7,542809517	8,353865106	4,232453462
Juli	2,715455514	6,76685738	8,335829689	7,735021919	4,498113752
Agustus	3,170147144	7,041996903	7,293114189	8,100349967	4,659152658
September	2,995017687	6,853710406	8,409262251	7,757122346	4,623906098
Oktober	3,213953488	7,234533703	8,033523677	8,303330757	5,137990251
November	3,294217577	6,732264827	7,61998376	7,530439632	4,872699198
Desember	2,615228094	6,479283015	6,7825257	7,091509261	4,621984096

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (data diolah)

Jika dilihat dari tabel diatas perkembangan NPF naik setiap tahunnya pada tahun 2013 berjumlah 2,62 persen , pada tahun 2014 naik berjumlah 6,48 persen, pada tahun 2015 berjumlah 6,78 persen, pada tahun 2016 berjumlah 7,10 persen, namun pada tahun 2017 turun menjadi 4,62 persen.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya dengan masa pengendapan yang memadai. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan

pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat.⁹

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.¹⁰ Dalam jurnal Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank atau semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, apabila tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi.¹¹

Berdasarkan uraian dan teori diatas peneliti tertarik mengambil judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. Alasannya karena jumlah alokasi pembiayaan UMKM yang cenderung menurun dari 2013-2017 sedangkan dana pihak ketiga perkembangannya semakin naik dan NPF nya tidak stabil. Hal itu tidak sejalan dengan teori.

⁹Yanis A. S. dan Priyadi M. P, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*, h. 1-16.

¹⁰ Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

¹¹ Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

Dalam jurnal Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya menurut Syafi'I Antonio salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan.¹² Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank atau semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, apabila tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi. Sedangkan pada data diatas NPF mengalami fluktuatif dimana tidak sejalan dengan teori Syafi'I Antonio. Penelitian terdahulu menurut Rina Destiana Dana Pihak Ketiga (DPK) Memiliki Pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan menurut Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu dalam variabel NPF menurut Wuri Arianti dan Harjum Muharam NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.

Sehingga peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh nya dari Dana Pihak Ketiga, kedua bank syariah memiliki prioritas utama dalam

¹² Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia, SHARE Vol. 4 No. 1, (January-Juni 2015), h. 86.

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Karena salah satu sumber utama keuntungan yang didapat bank yaitu di sektor pembiayaan.

Dengan demikian peneliti akan membahas lebih lanjut dengan skripsi berjudul “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2017”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Net Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah mengenai penghimpunan dana pada bank syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pemberian pembiayaan UMKM

2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Untuk sumber referensi dan informasi mengenai alokasi pembiayaan UMKM dalam membuat kebijakan bagi UMKM serta strategi peningkatan UMKM

3. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk sumber informasi mengenai pembiayaan UMKM agar lebih memilih bank syariah yang sehat sehingga dapat mempercayakan dana

yang ada untuk di kelola oleh bank agar dapat meningkatkan sektor
UMKM



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa *Italia*, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹³ Dalam al-qur'an, istilah bank tidak disebut kan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut kan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan

¹³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 29.

utamanya.¹⁴ Undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹⁶

Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

¹⁴Ibid.

¹⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 2.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33.

- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁷

Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



¹⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 16.

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.”

Adapun Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yaitu :

- 1) PT. Bank Aceh Syariah
- 2) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 3) PT. Bank Victoria Syariah
- 4) Bank BRI Syariah
- 5) B.P.D Jawa Barat Banten Syariah
- 6) Bank BNI Syariah
- 7) Bank Syariah Mandiri
- 8) Bank Syariah Mega Indonesia
- 9) Bank Panin Syariah
- 10) PT. Bank Syariah Bukopin
- 11) PT. BCA Syariah
- 12) PT. Maybank Syariah Indonesia
- 13) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut¹⁸:

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al-mudharabah.

¹⁸ Ismail, Op.Cit., h. 39

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

3. Peran Bank Syariah

Peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitution), sebagai berikut¹⁹:

¹⁹ Heri Sudarsono, Loc.Cit., h. 45.

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai cirri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut²⁰ :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga

²⁰ Heri Sudarsono, Loc.Cit.

telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

Adapun rancang bangun agar tercapainya tujuan pada bank syariah sebagai berikut :

5. Rancang Bangun Ekonomi Islam

a. Aidah (tauhid)

Dalam bahasa arab akidah berasal dari kata al-‘aqdu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Sedangkan menurut istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakiniinya.

b. Adil

Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi islam. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Sehingga orang yang adil adalah orang yang bertaqwa.

c. Nubuwwa

Dalam tradisi keberagaman nubuwwa sendiri termasuk nagian dogma agama yang prinsip. Nubuwwa adalah bagian dari sikap ketundukan, sikap keimanan. Gagasan ini akan mengarahkan siapapun pada ruang-ruang diskursif yang teramat luas. Sifat kenabian ini perlu dipelajari secara mendalam sebagai jembatan dalam upaya meneladani dan mengambil pelajaran didalamnya.

d. *Khilafah* (Pemimpin)

Kata *Khilafah* berarti suksesi bagaimana sesuatu mampu menciptakan kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Dan *khilafah* adalah penerus nabi Allah yang tujuannya untuk

menyempurnakan tugas-tugas reformasi dan terbiyat moral yang diajarkan oleh nabi.

e. Ma'ad atau *return*

Setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Begitu pula halnya dalam aktivitas ekonomi, hasil merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Namun perlu juga dipertegas bahwa hasil dalam tataran ekonomi islam tidak hanya berorientasi pada hasil yang berupa materiel. Namun juga bernilai ibadah sehingga return bagi seorang muslim adalah melihat aspek dunia dan akhirat.²¹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan

²¹ Sumar'in, Ekonomi Islam (Yogyakarta : Graha Ilmu) h. 60.

imbangan atau bagi hasil.²² Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).²³

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk²⁴ :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA,2011), h. 106.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 40.

²⁴Ibid, h. 41.

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian , pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana , artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk²⁵ :

²⁵Ibid, h. 43.

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha – usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goring. Peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening–rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah – langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi , peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana.

4. Unsur – unsur Pembiayaan²⁶

Adapun unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan,

²⁶Ibid, h. 107.

bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

c. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

d. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

5. Jenis –jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk , maka bank syariah'ah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis – jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya²⁷ :

a. Pembiayaan menurut tujuan :

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi , yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek , pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah , pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :

- 1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

a) Pembiayaan *Mudharabah*

²⁷Ibid, h. 45.

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual – beli antara bank dan nasabah di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat – syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

c) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

c) Surat Berharga Syari'ah

Surat berharga syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi

syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

d) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan/atau bank perkreditan syari'ah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadi'ah , deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah* , pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Ntar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk – bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

e) Penyertaan modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.

f) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan

pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

g) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (*off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi endosmen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah.

h) Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah.

4) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan :

a) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syari'ah dengan pihak

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

C. Sumber Dana Bank

1. Pengertian Sumber Dana

Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir seratus persen perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan usaha.²⁸ Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.²⁹ Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan.³⁰ Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut³¹:

²⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), h. 61.

²⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

³⁰ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 61.

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (yogyakarta: Ekonisia, 2012).

a. Tabungan

1) Al-Wadiah

Al-wadiah, dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

b. Investasi

1) Al-Mudharabah

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

2) Al-Mudharabah Mutlaqah

Penerapan *mudharabahmutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini

tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

c. Investasi khusus

1) Al-Mudharabah Muqayyadah on balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan *akad* tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2. Sumber-sumber Dana Bank

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang “dititipkan” pada bank dan sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Sebenarnya, dalam prinsip

ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan, adalah badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri atau perdagangan di mana modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari Kredit bank, dimana modalnya sendiri hanya berkisar 10 sampai 20% saja.³² Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional, bersumber dari³³:

a. Dana Dari Bank Itu Sendiri (Dana dari pihak Ke I)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dalam Neraca Bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi Pasiva (Liabilities). Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham = stockholders) ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

³²Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit., h. 84.

³³Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit.

- 2) Cadangan-cadangan yaitusebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.
 - 3) Laba yang ditahan atau *retained earnings* yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja. Biasanya *retained earnings* ini digunakan untuk memperkuat posisi *cash reserve* atau untuk pertambahan *loanable funds*.
- b. Dana pinjaman dari pihak luar atau dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke II)

Dana dari pihak kedua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank terdiri dari 4 pihak, yaitu:

- 1) Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *Call Money* ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga juga disebut dengan *overnight call money*.
- 2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini (dari bank atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan bank Indonesia di mana

secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.

3) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.³⁴

4) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.³⁵

c. Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan.³⁶

Bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya,

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 60.

³⁵ Ibid.

³⁶ Kasmir, Op.Cit., h. 59.

merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Itulah sebabnya bank selalu berusaha memberikan pelayanan (*service*) yang memuaskan pada masyarakat.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis yaitu³⁷ :

1) Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.³⁸ Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran. Rekening atas nama nasabah dibagi dalam dua golongan, yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan.

Perkembangan rekening giro pada bank, tidak hanya melulu berdasarkan kepentingan bank semata-mata, tapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu melalui

³⁷Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit., h.88.

³⁸Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit.

penggunaan cek.³⁹ Adapun jenis giro di perbankan syariah yaitu :

- a) Giro Wadiah merupakan titipan dari nasabah kepada bank syariah. Penarikan titipan tersebut dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine* (ATM), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁴⁰

Salah satu segi yang amat penting dalam peningkatan jumlah pemegang giro adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan pelayanan (*service*) yang menyenangkan nasabah. Dengan dua hal diatas, merupakan semacam promosi langsung di mana nasabah-nasabah tentu akan bercerita dengan teman-temannya tentang kesenangan mereka atas pelayanan bank yang cepat, tepat dan menyenangkan di samping keramahan tamahan pekerja bank yang merupakan syarat penting.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan

³⁹Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit.

⁴⁰ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 82.

bank yang bersangkutan.⁴¹ Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo. Dalam bank syariah lebih dikenal dengan sebagai berikut :

- a) Deposito Mudharabah yang merupakan dana simpanan nasabah dimana nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada bank syariah untuk mengelola dana tersebut dengan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Penarikan deposito mudharabah hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴²

3) Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

⁴¹Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit., h. 90.

⁴² Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 83.

tertentu.⁴³ Dalam bank syariah ada dua macam jenis tabungan yaitu⁴⁴:

- a) Tabungan Wadiah sama halnya dengan giro wadiah yaitu titipan dari nasabah kepada bank syariah. Perbedaan tabungan wadiah dan giro wadiah terletak pada waktu dan cara penarikannya. Pada tabungan wadiah penarikannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan tertentu dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Tabungan Mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu serta penarikan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau sejenisnya. Nasabah akan memperoleh imbalan dari tabungan mudharabah ketika bank syariah memperoleh keuntungan setiap periodenya. Imbalan tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.

⁴³ Muchdarsyah Sinungan, Loc.Cit., h. 91.

⁴⁴ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 82.

D. *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL). Dalam terminology bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁵

Menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.⁴⁶

⁴⁵ Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, Loc.Cit.

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 1-3 adalah sebagai berikut :

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.⁴⁷

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria dalam Undang – Undang ini.⁴⁸

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseroan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dengan

⁴⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 1

⁴⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2.

usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang – Undang ini.⁴⁹

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan rumusan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 1-3 menurut UU ini yang dimaksud usaha kecil, mikro dan menengah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok adalah sebagai berikut dan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau⁵⁰

⁴⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2.

⁵⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 1.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)⁵¹

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)⁵²

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara – negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara – negara maju (NM). Di Negara sedang berkembang, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok

⁵¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 2.

⁵² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 3.

usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di Negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Di Negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika, Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber dari pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan.⁵³

Di dalam literature diakui secara luas bahwa di Negara sedang berkembang, UMKM sangat penting karena karakteristik – karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar, yakni⁵⁴ :

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah , usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh pelosok pedesaan, termasuk di wilayah – wilayah yang relative terisolasi.
- b. Karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukan sebagai elemen penting dari


⁵³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu – isu penting cet ke-1* (Jakarta : LP3ES, 2012), h. 1.

⁵⁴ Ibid, h. 2.

kebijakan national untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

4. Masalah – masalah Utama UMKM

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan – hambatan tersebut (atau intensitasnya) bias berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintanga – rintangan yang umum tersebut adalah :

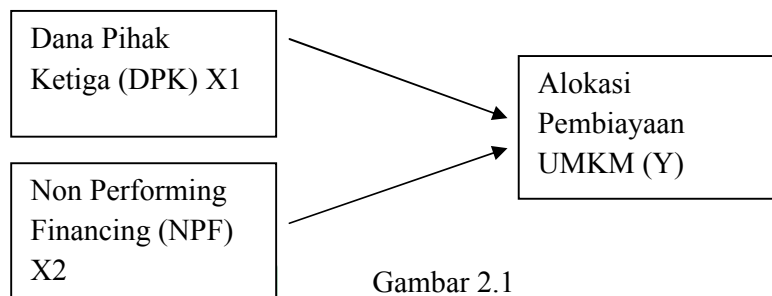
- 
- a. Keterbatasan modal kerja
 - b. Keterbatasan investasi
 - c. Kesulitan dalam pemasaran
 - d. Distribusi dan pengadaan bahan baku
 - e. Kualitas SDM rendah
 - f. Keterbatasan teknologi

Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran dan rendahnya produktivitas di UMKM di Indonesia dan di Negara sedang

berkembang umumnya adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian dari landasan teori diatas maka dapat peneliti gambarkan, kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dalam kerangka berfikir diatas penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X (Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing) terhadap variabel Y (Alokasi Pembiayaan UMKM) sehingga dari kerangka berfikir diatas dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam skema diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam teori Syafi'I Antonio mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk

pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan.

Karena Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu simpanan yang mempengaruhi terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

Non Performing Financing (NPF) Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam skema diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Karena NPF merupakan salah satu faktor besar kecilnya alokasi pembiayaan. Dalam teori Syafi'I Antonio yang menyatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

G. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa refrensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pada tahun 2011 telah ditulis skripsi atas nama Irma Anindita dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010). Hasil dari penelitian ini adalah secara

simultan bahwa CAR, LDR, NPL dan Suku Bunga dengan uji F berpengaruh secara signifikan. Hasil secara parsial dengan uji t, diperoleh hasil bahwa variabel CAR, NPL dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM dengan tingkat signifikansi 0,000, 0,000 dan 0,035, sedangkan variabel LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penyaluran pembiayaan UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menganalisis tingkat suku bunga, CAR, NPL, dan LDR.⁵⁵

2. Pada tahun 2013 telah ditulis skripsi atas nama Ferial Nurbaya dengan judul Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 Desember 2009 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis Dana Pihak Ketiga

⁵⁵Irma Anindita, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010)" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

(DPK). Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang pembiayaan *Murabahah*.⁵⁶

3. Telah ditulis jurnal atas nama Wuri Arianti dan Harjum Muharam dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dapat dilihat dengan uji F dengan nilai 0,000 lebih kecil dari 5%. Dapat diprediksi dari empat variabel terhadap pembiayaan adalah 98,9% yang ditunjukkan oleh adjusted R² sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan pada Perbankan Syariah.⁵⁷

⁵⁶Ferial Nurbaya, “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

⁵⁷Wuri Arianti dan Harjun Muharam, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)”.

4. Pada tahun 2016 telah ditulis jurnal atas nama Rina Destiana dengan judul Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada perbankan syariah adalah DPK dan likuiditas, sedangkan faktor lain seperti modal, laba dan risiko tidak memiliki signifikansi pada pembiayaan UMKM. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menganalisis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor internal.⁵⁸
5. Pada tahun 2015 telah ditulis jurnal atas nama Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity ratio (DER), dana pihak ketiga (DPK), financing to deposit ratio (FDR), current ratio (CR), dan return on asset (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang dana pihak

⁵⁸Rina Destiana, "Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia", *JRKA*, Vol. 2 Isue 1 (Februari 2016).

ketiga (DPK). Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu menganalisis tentang pembiayaan *Murabahah*.⁵⁹

6. Pada tahun 2015 telah ditulis jurnal atas nama Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel DPK dan NPF. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan berbasis bagi hasil.

H. Hubungan Antara Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis

⁵⁹Ahmad Samhan Yanis dan Priyadi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*, Vol. 4 No. 8 (2015).

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁰ Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya dalam jurnal, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶¹ Dalam jurnal Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya menurut teori Syafi'I Antonio salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan.⁶²

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka pembiayaan akan meningkat pula.

Menurut Rina Destiana dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia” dapat disimpulkan

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, ctk 21 (Bandung: Alfabet, 2014), h. 36.

⁶¹ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 91.

⁶² Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM..⁶³ Menurut Wuri arianti dan Harjum Muharam dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Menurut Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.⁶⁴

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

⁶³ Rina Destiana, *Loc.Cit.*, h. 15.

⁶⁴ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *SHARE*, Vol. 4 No. 1 (Januari - Juni 2015).

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam jurnalnya menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank atau semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, apabila tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi.⁶⁵

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Non performing Financing rendah maka penyaluran pembiayaan akan tinggi. Sebaliknya jika NPF tinggi maka penyaluran pembiayaan akan rendah.

Menurut Wuri Arianti dan Harjum Muharam dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada bank Muamalat

⁶⁵ Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

Indonesia Periode 2001-2011)” dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Menurut Novia Nurbiaty dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015” dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.⁶⁶

Menurut Nurimansyah Setivia Bakti dalam jurnal yang berjudul “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” dapat disimpulkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Non Performing Financing (NPF) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

H₂ : Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

⁶⁶ Novia Nurbiaty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015”, JOM Fekon, Vol 4 No. 1 (Februari 2017).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ho : Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

H₃ : Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan berpengaruh signifikan Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan. Data yang diperoleh merupakan data Statistik Perbankan Syariah yang diperoleh dari web Otoritas Jasa Keuangan. Data tersebut menggunakan data bulanan periode 2013-2017.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif, penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan. Dalam penelitian ini analisis menggunakan statistik dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews 9.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 80.

Syariah yang ada di Indonesia (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah periode 2013-2017.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel metode *purposive sampling*, yang merupakan metode penetapan untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria – kriteria tertentu.⁶⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data dalam rentan waktu 60 bulan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013-2017 karena pada masa tersebut berada dalam siklus yang tergolong lengkap.

4. Data dan Sumber Data

Dalam menyusun proposal ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

⁶⁸Ibid, h. 116.

⁶⁹ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011) , h. 148.

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari catatan, buku-buku, artikel-artikel, koran, majalah-majalah dan media perantara baik melalui website yang telah dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait maupun melalui kepustakaan berdasarkan *literature* terkait penelitian.

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁰ Dalam variabel penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Variabel Independen adalah variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen sebagai Dana Pihak Ketiga berikut :

a) Dana Pihak Ketiga (DPK) X1

b) Non Performing Financing (NPF) X2

⁷⁰Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 38.

2) Variabel Dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Y).

Sehingga dapat digambarkan variabel penelitian sebagai berikut :

b. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana untuk mengukur suatu variabel. Sehingga dengan variabel operasional tersebut mampu menunjukkan indikator-indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel yang akan dianalisa. Variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu di operasionalkan adalah

Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	DPK= Giro+Deposito+tabungan	Rasio

Non Performing Financing (NPF)	Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan sektor UMKM/pembiayaan bermasalah sektor UMKM}}{\text{Pembiayaan yang disalurkan sektor UMKM}} \times 100\%$	Rasio
Pembiayaan UMKM	unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara UMI, UK, UM, dan UB umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata – rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.		Laporan Keuangan

6. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku

sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.⁷¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Field Research*

Peneiliti menggunakan data sekunder dalam runtut waktu (*time series*) yang diambil dari data tahunan statistik perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian dengan rentang waktu Januari 2013 – Desember 2017.

2) *Library Research*

Library Research adalah teknik pengmpulan data yang diperoleh dari membaca, mempelajari, dan menganalisis literature yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.⁷²

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunkan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda (*linear regression analysis*) adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas

⁷¹V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta:PT Pustaka Baru 2015), h. 89.

⁷²Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142.

(*Independen Variables*) terhadap satu variabel respons (*dependen variabel*) dengan rumus sebagai berikut:⁷³

$$Y = C + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Dimana:

Y = Pembiayaan UMKM

C = Konstanta

X₁ = DPK

b₂ = Koefisiensi Regresi

X₂ = NPF

e = Residual/Error

b₁ = Koefisiensi Regresi

adapun syarat uji asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji heteroksida , uji normalitas , uji autokorelasi , dan uji linearitas.⁷⁴ Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian.

Terdiri dari :

⁷³ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.

⁷⁴ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 104.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar.⁷⁵ Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui $t_{\text{tabel}} > 0,05$. Maka data tersebut berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Pada umumnya hubungan antara variabel bebas adalah tidak sempurna. Jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada *multicollinearity* sama sekali. Akibat selanjutnya, statistik t cenderung lebih kecil atau koefisiensi regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. Ada beberapa indikasi adanya *multicollinearity* sebagai berikut:

- 1) Jika statistik F signifikan tetapi statistik t tidak ada yang signifikan

⁷⁵Ibid, h. 57.

- 2) Jika R^2 relatif besar tetapi statistik t tidak ada yang signifikan⁷⁶

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikorelasi di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai $Tolerance > 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Istilah autokorelasi berarti terjadi hubungan antara error term pada suatu observasi dengan error term pada observasi yang lain akibatnya variabel terikat pada suatu observasi berhubungan dengan observasi yang lain. Jika autokorelasi merupakan korelasi *time series*. Otokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, dan masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan

⁷⁶Sri Mulyono, *Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 264.

otokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek (*cross section*).⁷⁷

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya $(t-1)$.⁷⁸ Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah terjadinya peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah.

4) Uji Heteroskedasitas

Heteroscedasticity berarti *varians error term* tidak sama untuk setiap observasi. Masalah *heteroscedasticity* sering dijumpai dalam data *cross section* dibanding data *time series*. Dengan adanya *heteroscedasticity* ini penduga *least squares* tetap tidak bias dan konsisten tetapi varians tidak menurun meskipun ukuran sampel diperbesar menjadi tak terhingga. *Heteroscedasticity* dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun regresi majemuk.⁷⁹ Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dan residual atau pengalaman ke pengamatan yang lainnya.

⁷⁷Wing Wahyu Winarmo, *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*, Cetakan Ke-5 (Yogyakarta: STIM YKPN, 2017), h. 5. 29.

⁷⁸Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan, Ke-7, 2013), h. 110.

⁷⁹*Ibid.*, h. 265.

Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedosisitas dapat menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai residual mutlak. Apabila nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$ (5%) maka dapat dilakukan model regresi tidak mengandung heteroskedosisitas.

b. Uji Hipotesis

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statisnya berada di dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila uji statisnya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Dalam analisis regresi linear ada 3 jenis kriteria ketepatan yaitu :

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji T (Uji Parsial) untuk pengujian nilai hipotesis kedua.

Uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terkait apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing – masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti (5% = 0,05) apakah nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.⁸⁰ Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan

⁸⁰Op. cit, Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, h. 87-88.

dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan criteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_a diterima
- b) Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_o ditolak

2) Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F (uji serempak) untuk menguji hipotesis pertama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terkait. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$ maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama sehingga dapat diterima. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi α 5% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_a ditolak
- b) Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_o diterima

c. Uji Koefisiensi Determinan (r^2)

Koefisien Determinasi adalah bilangan yang menyatakan presentase variabel (Y) yang dijelaskan oleh garis regresi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan

variabel dependen R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yang digunakan model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.⁸¹



⁸¹Ibid , h. 44.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Profil Objek Penelitian

a. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah perbankan syariah di Indonesia bermula dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Amanah Rabbaniah di Kabupaten Bandung pada 10 Agustus 1990 (Hasbi M. Hasyim, wawancara tanggal 14 November 2008). Kemudian MUI mengadakan Lokakarya Alim Ulama Mengenai Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua-Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Loka karya tersebut merekomendasikan berdirinya lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Departemen Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober 1990 menerbitkan izin prinsip untuk ketiga BPRS tersebut di atas. Sedangkan izin usaha untuk kedua BPRS tersebut diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal 25 Juli 1991 yaitu Izin Usaha: KEP No. 201/KM-13/1991 tanggal 25 Juli 1991 untuk BPRS Amal Sejahtera dan Izin Usaha No. 2001/Tahun 1991 untuk BPRS Dana Mardhatillah, dan mulai tanggal 19 Agustus 1991 kedua BPRS tersebut beroperasi secara resmi.

Pada tanggal 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan berdasarkan Akte Notaris Yudo Paripurno, SH, dan mulai beroperasi secara komersial tanggal 1 Mei 1992. Berdirinya BMI sebagai BUS pertama member inspirasi bagi berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, seperti BPRS, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dan sejenisnya. Kemudian pada tahun 1992 juga, dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. UU tersebut belum memberi landasan undang-undang yang cukup kuat terhadap pengembangan perbankan syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil.

Pada tahun 1998 lahir UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lahirnya UU tersebut memberikan landasan bagi keberadaan perbankan syariah melalui sistem perbankan ganda (*dual system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang berlaku pada sebuah Negara. Berdasarkan UU tersebut juga dimungkinkan beroperasinya sistem perbankan ganda yang mana bank umum konvensional dapat membuka kantor cabang syariah.

Kemudian pada tahun 1999 didirikan bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) serta dibukanya Unit Usaha Syariah (UUS) pertama yaitu UUS Bank IFI. Pada tahun tersebut keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang member kewenangan pada BI untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2002 dikeluarkan sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia atau PBI (Siregar 2002). Pada tahun 2002 didirikan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. Berdirinya lembaga/institusi tersebut menunjukkan era baru bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan sekaligus sebagai bukti keseriusan BI menangani dan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003 BI juga mengeluarkan beberapa peraturan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 lahir UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data (n) yang digunakan dalam penelitian serta menunjukkan nilai maksimum,

minimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Maximum
DPK (milyar)	60	226.000	216.000	49.000	151.000	335.000
NPF (%)	60	6,018359	6,818118	1,943822	2,615228	8,353865
PEMB UMKM (milyar)	60	67.900	57.100	23.100	41.700	110.000

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa jumlah data atau n yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60. Pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen yang merupakan penyaluran dana salah satu fungsi perbankan syariah yang memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 67.900 milyar rupiah. Hasil rata-rata pembiayaan masih lebih kecil dari nilai rata-rata DPK 226.000 milyar rupiah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa perbankan syariah di Indonesia belum memaksimalkan dalam menyalurkan dana yang berasal dari DPK.

Variabel dana pihak ketiga (DPK) pada tabel diatas data per bulan perbankan syariah periode 2013-2017 DPK menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 226.000 milyar rupiah. Sedangkan nilai maximum diperoleh sebesar 335.000 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menyimpan atau

menginvestasikan dana nya pada perbankan syariah tinggi, sehingga DPK yang dimiliki juga tinggi.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada tabel diatas data bulanan perbankan syariah periode 2013-2017 NPF menunjukkan bahwa nilai maximumnya sebesar 8,35% dan nilai rata-rata (mean) sebesar 6,01% sehingga, dapat dikatakan kondisi NPF dikatakan baik.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan variabel dependen atau independen yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal. Setelah data diolah menggunakan Eviews 9 maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Normalitas

Sampel	Jarque-Bera	Signifikansi	Keterangan
60	4,894514	0,086531	Normal

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Jarque-Bera* sebesar 4,894514, dengan signifikansi sebesar 0,086531 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya bahwa data variabel independen yaitu DPK dan NPF data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada *multicollinearity* sama sekali. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai dan Variance Inflation Factors (VIF). Apabila VIF lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan asumsi model tersebut terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka asumsi model tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Setelah data diolah menggunakan Eviews 9 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
DPK	1.489684	Tidak terjadi multikolinearitas
NPF	1.489684	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel diatas bahwa hubungan antara variabel independen DPK dan NPF tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF dari DPK sebesar 1.489684 dan NPF sebesar 1.489684, artinya nilai VIF menunjukkan lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model asumsi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah terjadinya peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Jika probabilitas *Chi Square* lebih dari tingkat signifikansi 5% maka dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Dapat dilihat dari angka Prob. Chi-Square dari hasil uji autokorelasi menggunakan Eviews 9 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Sampel	Prob. <i>Chi Square</i>	Keterangan
59	0.2684	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel 4.4, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi Square $0.2684 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedasitas

Heteroscedasticity berarti *varians error term* tidak sama untuk setiap observasi. Masalah *heteroscedasticity* sering dijumpai dalam data *cross section* dibanding data *time series*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dan residual atau pengalaman ke pengamatan yang lainnya. Untuk

mengetahui adanya gejala heteroskedositas dapat menggunakan uji *glejser* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Uji Heteroskedasitas
(Uji Glejser)

Heteroskedasticity Test: Glejser	
Prob. Chi-Square(2)	0.7283

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.7283 yang lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Karena nilai probabilitas Chi Square $> \alpha = 5\%$ ($0.7283 > 0,05$) maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang dipergunkan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda (*linear regression analysis*) adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas (*Independen Variabel*) terhadap satu variabel respons (*dependen variabel*). Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi	Kesimpulan
(Constant)		44.08247	20.76156	0,0000	
DPK	Negative	-0.348897	-5.366130	0,0000	Diterima
NPF	Negative	-0.126402	-17.81294	0,0000	Diterima
F _{hitung} : 44.08247					
Signifikansi: 0,000000					
Adjusted R ² : 0.919821					
R square : 0.922539					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji regresi berganda tabel 4.6 terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil model regresi sebagai berikut : $= 44.08247 + (-0.348897) \text{ DPK} + (-0.126402) \text{ NPF}$

2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi adalah bilangan yang menyatakan presentase variabel (Y) yang dijelaskan oleh garis regresi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen R² sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yang digunakan model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai Adjusted R² untuk mengetahui model regresi manakah yang cocok dan baik untuk digunakan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi R²

diperoleh nilai sebesar 0.919821 atau 91,98%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh DPK dan NPF terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM yakni sebesar 0.919821 atau 91,98% sisanya 8,02% dipengaruhi variabel lainnya.

3. Uji Hipotesis secara simultan (Uji F)

Uji F (uji serempak) untuk menguji hipotesis pertama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bernakna terhadap variabel terkait. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Dalam penelitian ini diketahui hasil uji hipotesis secara simultan diketahui bahwa nilai f_{hitung} sebesar 44.08247 dengan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ (5%), sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yaitu DPK dan NPF berpengaruh secara bersamaan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Uji hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji T (Uji Parsial) untuk pengujian nilai hipotesis kedua. Uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terkait apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing – masing

variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($5\% = 0,05$). Dengan ketentuan jika nilai signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ (5%) maka H_0 dapat ditolak dan H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0.348897, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) dari variabel Dana Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia diterima.

b. Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0.126402, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut bahwa non performing financing berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi

pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dari variabel *Non Performing Financing* yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia diterima.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan. Dari tabel 1.1 perkembangan dana pihak ketiga mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 sebesar 183.534 milyar rupiah hingga 2017 sebesar 334.719 milyar rupiah. Hasil uji parsial ini menggunakan alat uji statistik menggunakan Eviews menghasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan umkm pada perbankan syariah di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar -0.348897, dan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0.05 (5%). Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis (H_1)

yang menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa DPK mempunyai pengaruh signifikan tetapi negatif terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan teori Syafi'I Antonio yang menyatakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK.

Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan. Semakin banyak DPK berupa tabungan, deposito dan giro yang dihimpun bank syariah dari masyarakat, belum tentu dapat meningkatkan porsi pembiayaan UMKM. Dalam penelitian ini menghasilkan DPK berpengaruh negatif. Dikatakan negative artinya Dana Pihak Ketiga meningkat, tetapi alokasi pembiayaan yang disalurkan menurun. Hal ini disebabkan karena DPK yang bersistem jangka pendek sedangkan pembiayaan UMKM yang disalurkan berjangka panjang. Oleh sebab itu DPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan UMKM yang berjangka panjang sehingga menyebabkan porsi pembiayaan UMKM lebih rendah dari pada pembiayaan non UMKM.

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Rina Destiana (2016) dan Wuri Arianti dan Harjum Muharam yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya (2015) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan informasi dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana pihak ketiga bank syariah per Agustus 2017 adalah senilai Rp309,00 triliun. Nilai tersebut tumbuh 26,20% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Namun BNI Syariah mencatatkan pertumbuhan penghimpunan DPK di atas rata-rata industri perbankan syariah, yaitu sebesar 21,4%, Pertumbuhan tertinggi ada di produk tabungan yaitu sebesar 25,6%. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah DPK di atas rata-rata ialah UUS Bank Tabungan Negara (BTN) dengan pertumbuhan DPK 13% atau menjadi Rp. 21,2 triliun. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat maupun institusi tersebut didorong semakin baiknya pemahaman mengenai perbankan syariah. Hal tersebut pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah.

Dalam teori *Agency* yang dipakai hubungan variabel ini dengan teori tersebut adalah bank merupakan seorang principal dan nasabah merupakan seorang pemilik modal. Pihak bank harus benar-benar membangun kerjasama yang baik antara bank dan nasabah, agar nasabah dapat mempercayakan dana nya tersebut. Nasabah merasa aman menginvestasikan dana nya pada bank tersebut. Bank harus

mengelola dana tersebut dengan baik. Contohnya disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana contohnya pelaku UMKM. Pelaku UMKM tentunya memakai dana untuk mengembangkan usaha, dan bank harus melihat sudah layak atau belum pelaku UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi islam Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dalam perbankan syariah terdapat tiga sumber dana pihak ketiga (DPK) yaitu, giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Dalam ketiga tersebut bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank. Lain halnya dengan bank konvensional yang menerapkan prinsip persentase yaitu memakai bunga. Dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari salah satu aspek yaitu Ma'ad atau *return*, setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Dalam orientasi return bagi seorang muslim adalah melihat aspek dunia akhirat. Dalam penelitian ini memakai variabel Dana Pihak Ketiga artinya bank harus lebih selektif dalam menghimpun dana masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali. Bank harus melihat kearah mana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Bank syariah menerapkan prinsip halal dan haram, apabila dana tersebut dari dan digunakan bukan untuk mencapai fahlah maka bank tidak akan

mengeluarkan dana tersebut. Karena setiap kegiatan ekonomi islam memiliki tujuan yaitu untuk mencapai *falah*.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya non performing loan (NPL). Dalam terminology bank syariah disebut non performing financing (NPF). Dari tabel 1.1 perkembangan *Non Performing Financing* mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Hasil uji parsial ini menggunakan alat uji statistik menggunakan EvIEWS menghasilkan bahwa non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar - 0.126402. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dari variabel *Non Performing Financing* yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan umkm pada perbankan syariah di Indonesia diterima.

Hal ini mendukung teori Muhammad Syafi'I Antonio yang menyatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Dalam penelitian ini *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan UMKM artinya Non Performing Financing mengalami penurunan sehingga alokasi pembiayaan yang disalurkan akan meningkat. Apabila *Non Performing Financing* berpengaruh positif maka NPF mengalami peningkatan sehingga alokasi pembiayaan yang disalurkan akan menurun. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi peningkatan pada NPF maka alokasi pembiayaan UMKM akan mengalami penurunan dan juga semakin besar resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Bila berlangsung terus menerus akan mengurangi modal bank. Akibat tingginya NPF bank juga akan berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan dana. Hal ini dikarenakan adanya potensi pembiayaan yang tidak tertagih.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti dan Harjum Muharam yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Nurbiaty (2017) dan Nurimansyah Setivia Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lonjakan *Non Performing Financing*, di bank syariah telah melampaui batas maksimum 5%, alias mencapai 5,54%. Hal ini tentu menjadi *warning* bagi pelaku bank syariah dalam menjaga kualitas pembiayaan. Diantara 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang tercatat memiliki angka NPF tinggi adalah Maybank Syariah, NPF nya mencapai 35,15%. Angka ini jauh diatas ambang batas yang diperbolehkan regulator. Itu disebabkan karena kelemahan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Pembayaran jangka panjang misalnya, pada dasarnya untuk meringankan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tpi pada kenyataannya nasabah melalaikannya dan sering menganggap enteng. Dan kurang optimalnya control dari pihak bank dan marketing. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki rasio NPF tinggi adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kaltim dengan rasio NPF 7,18%. Rasio NPF yang tinggi akan mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UMKM, apabila rasio NPF tinggi maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan rendah. Karena bank tidak ingin menerima resiko lebih tinggi. Tentu

ini sangat berpengaruh terhadap UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Karena sejatinya mereka sangat membutuhkan modal untuk meneruskan usahanya. Pengaruhnya terhadap bank yaitu dapat mengurangi laba perusahaan, karena bank diwajibkan membuat Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) serta akan berdampak pada bagi hasil kepada nasabah simpanan. Apabila ini terjadi terus menerus maka bank syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional.

Non Performing Financing terendah ada pada Bank BCA Syariah perolehan NPF nya dibawah angka 1% itu menandakan pembiayaan bermasalah yang sangat rendah. Itu dikarenakan Bank BCA menerapkan *risk management* dengan maksimal. Dan NPF terendah Pada Unit Usaha Syariah adalah bank DKI dengan NPF sebesar 6,13%. Artinya keduanya dalam pembiayaan bermasalah yang ada di perusahaannya masing-masing tidak mengalami permasalahannya. Pengaruhnya terhadap UMKM tentunya adalah bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih tinggi nya kepada UMKM. Karena simpanan yang terdapat di bank atau likuiditas yang ada di bank tersebut tidak terganggu. Karena transaksi pengembalian dari nasabah kepada bank tergolong lancar. Pengaruhnya terhadap bank yaitu akan meningkatkan laba, meningkatkan PPAP serta bagi hasil kepada nasabah simpanan.

Dalam teori *Agency* yang dipakai hubungan variabel ini dengan teori tersebut adalah salah satu kriteria dalam teori *Agency* adalah pihak *principal* yaitu bank harus menguasai informasi terhadap pemilik modal (nasabah). Bank harus menguasai informasi terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Dilihat dari karakter nasabah tersebut, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, modal nasabah, jaminan yang diberikan dan kondisi yang melatarbelakangi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau disebut juga kredit macet yang tentunya akan mengganggu aktivitas kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi islam, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan syariah. Sedangkan *Non Performing Loan* terdapat pada bank konvensional. NPL menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Sedangkan NPF timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat *gharar* dan *maysir*, riba atau bunga yang ditetapkan dimuka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah resiko bisnis. Sebagai pengganti bunga, bank syariah memfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari salah satu aspek yaitu

Ma'ad atau *return*, setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Dalam orientasi *return* bagi seorang muslim adalah melihat aspek dunia akhirat. Dalam NPF ini bank syariah tidak memakai persentase atau bunga. Melainkan denda, dimana denda tersebut nantinya akan masuk ke dana sosial bukan masuk sebagai modal untuk pembiayaan.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017 yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0.0000 < 0,05$ (5%). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Hal ini bahwa alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi secara simultan oleh variabel DPK dan NPF.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap variabel penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga selama periode pada penelitian ini diperoleh hasil nilai signifikansinya sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Dan nilai koefisiennya sebesar -0.348897, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena DPK yang bersistem jangka pendek sedangkan pembiayaan UMKM yang disalurkan berjangka panjang. Oleh sebab itu DPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan bagi hasil yang berjangka panjang sehingga menyebabkan porsi pembiayaan UMKM lebih rendah dari pada pembiayaan non UMKM.
2. Variabel *Non Performing Financing* selama periode penelitian ini diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Dan nilai koefisiennya sebesar -0.126402, Maka dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi peningkatan pada NPF maka alokasi pembiayaan UMKM akan mengalami penurunan dan juga semakin besar

resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Bila berlangsung terus menerus akan mengurangi modal bank.

3. Variabel dana pihak ketiga (DPK) dan non performing financing (NPF) selama periode penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017 yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0.0000 < 0,05$ (5%). Hal ini bahwa alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi secara simultan oleh variabel DPK dan NPF.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Bank harus lebih mengelola sumber dana yang telah didapat. Dan adil dalam membagi penyaluran pembiayaan.
2. Bagi nasabah dan investor apabila ingin melakukan pembiayaan dan menginvestasikan dananya harus melihat berapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK), karena DPK memberikan pengaruh terhadap alokasi pembiayaan. Penelitian ini dapat digunakan oleh nasabah dan investor sebagai acuan dalam melakukan pembiayaan dan pengambilan keputusan menginvestasikan dananya.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi kepustakaan pihak kampus. Dan bagi peneliti selanjutnya

diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- , 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyono, Sri. 2006. *Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'I, M. Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sutrisno,Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM.
- Sholihin, A. Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Syofian. 2011. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripssi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonisia.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Winarmo, W. Wahyu. 2017. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Ahmad Samhan Yanis dan Priyadi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*, Vol. 4 No. 8 (2015).
- Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *jurnal ekonomi dan keuangan*, Vol. 1 No. 3 (Februari 2013).
- Ferial Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).
- Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *jurnal ekonomi*, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015).
- Novia Nurbiaty, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015", *JOM Fekon*, Vol 4 No. 1 (Februari 2017).

Rina Destiana, “Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia”, *JRKA*, Vol. 2 Isue 1 (Februari 2016).

Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011).

Yanis A. S. dan Priyadi M. P, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*.

Irma Anindita, “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010)” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 2.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 3.

Lampiran 2

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.260006	Prob. F(2,54)	0.2919
Obs*R-squared	2.630585	Prob. Chi-Square(2)	0.2684

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/27/18 Time: 12:01

Sample: 2013M02 2017M12

Included observations: 59

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.069074	2.159122	0.031992	0.9746
LN_DPK	-0.002145	0.066120	-0.032444	0.9742
NPF	0.000291	0.007365	0.039518	0.9686
RESID(-1)	-0.203264	0.136046	-1.494083	0.1410
RESID(-2)	0.028974	0.136381	0.212446	0.8326
R-squared	0.044586	Mean dependent var	5.40E-16	
Adjusted R-squared	-0.026185	S.D. dependent var	0.087061	
S.E. of regression	0.088194	Akaike info criterion	-1.937623	
Sum squared resid	0.420020	Schwarz criterion	-1.761560	
Log likelihood	62.15987	Hannan-Quinn criter.	-1.868895	
F-statistic	0.630003	Durbin-Watson stat	1.994190	
Prob(F-statistic)	0.643204			

Lampiran 3

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.304456	Prob. F(2,57)	0.7387
Obs*R-squared	0.634186	Prob. Chi-Square(2)	0.7283
Scaled explained SS	0.640427	Prob. Chi-Square(2)	0.7260

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 09/27/18 Time: 11:57

Sample: 2013M01 2017M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.068515	1.312688	0.813990	0.4190
LN_DPK	-0.030792	0.040195	-0.766058	0.4468
NPF	0.002461	0.004387	0.560923	0.5770
R-squared	0.010570	Mean dependent var	0.066283	
Adjusted R-squared	-0.024147	S.D. dependent var	0.053029	
S.E. of regression	0.053665	Akaike info criterion	-2.963399	
Sum squared resid	0.164157	Schwarz criterion	-2.858681	
Log likelihood	91.90196	Hannan-Quinn criter.	-2.922438	
F-statistic	0.304456	Durbin-Watson stat	1.298843	
Prob(F-statistic)	0.738716			

Lampiran 4

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

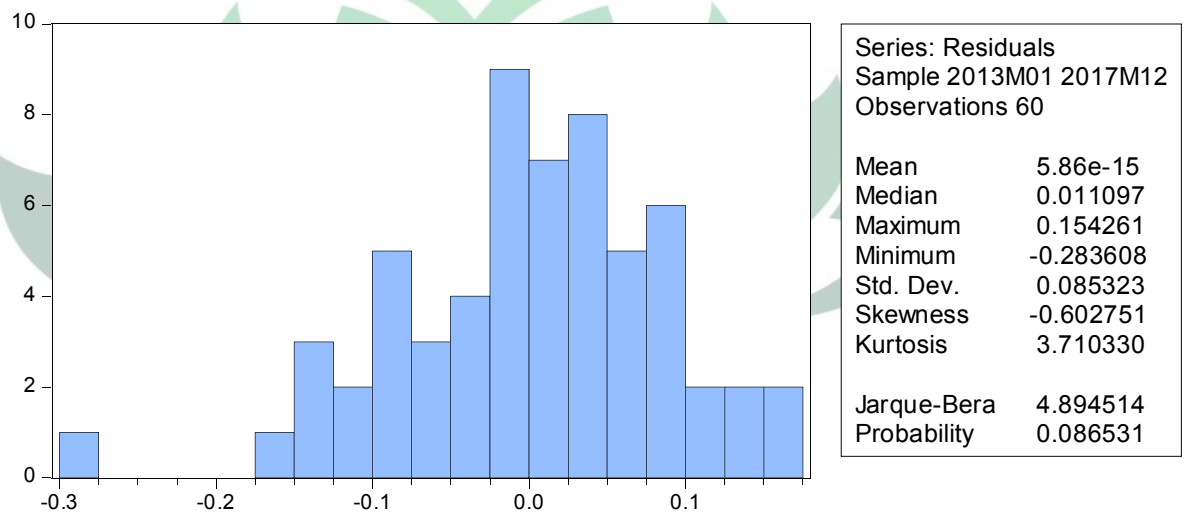
Date: 09/27/18 Time: 11:58

Sample: 2013M01 2017M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.508660	35899.61	NA
LN_DPK	0.004227	36722.95	1.489684
NPF	5.04E-05	16.01202	1.489684

Uji Normalitas



Lampiran 5

Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LN_PEMB_UMKM

Method: Least Squares

Date: 09/27/18 Time: 12:00

Sample: 2013M01 2017M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.08427	2.123360	20.76156	0.0000
LN_DPK	-0.348897	0.065018	-5.366130	0.0000
NPF	-0.126402	0.007096	-17.81294	0.0000
R-squared	0.922539	Mean dependent var	31.79962	
Adjusted R-squared	0.919821	S.D. dependent var	0.306566	
S.E. of regression	0.086807	Akaike info criterion	-2.001553	
Sum squared resid	0.429520	Schwarz criterion	-1.896836	
Log likelihood	63.04660	Hannan-Quinn criter.	-1.960593	
F-statistic	339.4269	Durbin-Watson stat	1.035118	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 1

tanggal	In pemb UMKM	In DPK	NPF
Jan-13	32.16008749	32.84342105	2.62
Feb-13	32.20049159	32.64694241	2.86
Mar-13	32.24409002	32.6870376	2.88
Apr-13	32.2580115	32.69689558	3.01
May-13	32.27048644	32.73002132	3.08
Jun-13	32.27364122	32.73068021	2.77
Jul-13	32.32174495	32.7457341	2.72
Aug-13	32.28237808	32.76812458	3.17
Sep-13	32.29988884	32.77677571	3.00
Oct-13	32.30851196	32.79017986	3.21
Nov-13	32.31602783	32.80316283	3.29
Dec-13	32.33228299	32.84342105	2.62
Jan-14	32.31442931	32.81241133	2.98
Feb-14	32.30459733	32.81366946	3.82
Mar-14	32.31617555	32.82921423	3.19
Apr-14	32.32700046	32.85411912	3.47
May-14	31.78594324	32.88215777	6.65
Jun-14	31.78732275	32.88639967	6.43
Jul-14	31.77013188	32.90041933	6.77
Aug-14	31.81858276	32.90892657	7.04
Sep-14	31.61268212	32.91494032	6.85
Oct-14	31.80510065	32.96432428	7.23
Nov-14	31.71106389	32.97643197	6.73
Dec-14	31.72212711	33.01486459	6.48
Jan-15	31.69390941	32.98174591	7.24
Feb-15	31.68766381	32.97954193	7.67
Mar-15	31.67762746	32.99225694	7.21
Apr-15	31.63493026	32.99455021	7.30
May-15	31.57458155	33.00323465	8.04
Jun-15	31.59738078	32.99455021	7.54
Jul-15	31.54450306	33.00668371	8.34
Aug-15	31.3624331	33.00794632	7.29
Sep-15	31.46885922	33.02273775	7.41
Oct-15	31.46090088	33.02227312	8.03
Nov-15	31.47686158	33.02753087	7.62
Dec-15	31.54884725	33.07419612	6.78
Jan-16	31.52526704	33.06515352	7.66
Feb-16	31.51706969	33.07698232	7.91
Mar-16	31.53117395	33.08058638	7.56
Apr-16	31.53315539	33.08552138	7.93
May-16	31.54070138	33.10482842	7.21
Jun-16	31.58134133	33.11721127	8.35
Jul-16	31.56919908	33.12483947	7.74
Aug-16	31.5601372	33.1316383	8.10
Sep-16	31.60002919	33.20515797	7.76
Oct-16	31.60227483	33.20953511	8.30

Nov-16	31.61620164	33.23121927	7.53
Dec-16	31.62977212	33.26343289	7.09
Jan-17	31.61087098	33.25761292	7.55
Feb-17	31.60913144	33.26967467	7.29
Mar-17	31.63023048	33.28763511	6.93
Apr-17	31.64735008	33.30739471	6.89
May-17	31.64995943	33.3200486	5.65
Jun-17	31.67965327	33.34149118	5.35
Jul-17	31.64561876	33.35994488	5.64
Aug-17	31.67493166	33.36438181	5.75
Sep-17	31.68440479	33.3948759	5.73
Oct-17	31.68539402	33.39660086	6.22
Nov-17	31.67391448	33.4077907	5.95
Dec-17	31.70820256	33.44431249	5.66

